E-ISSN: 3025-0994
Halaman 1768-1773
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Digitalisasi Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja

Yudi Mulyana[1], Wiwit Setyawati[2]
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
e-mail: mulyanayudi89@gmail.com[1], dosen00875@unpam.ac.id[2]

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan digitalisasi teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja cabang Gunung Sindur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh reformasi perpajakan melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PMK Nomor 55 Tahun 2022 yang bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan, sedangkan digitalisasi teknologi berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan digitalisasi teknologi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci : Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Digitalisasi Teknologi, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM

Abstract

This study analyzes the influence of tax knowledge, tax sanctions, and technological digitalization on taxpayer compliance among MSMEs at the Abdi Kerta Raharja Sharia Savings and Loans and Financing Cooperative (KSPPS) Gunung Sindur branch. This research is motivated by tax reforms through Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations and Minister of Finance Regulation Number 55 of 2022, which aim to improve MSME tax compliance. The study uses a quantitative approach with multiple linear regression analysis. The results show that tax knowledge has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance, tax sanctions have no significant effect, while technological digitalization has a positive and significant effect. Simultaneously, tax knowledge, tax sanctions, and technological digitalization have a significant effect on MSME taxpayer compliance.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanctions, Technology Digitalization, Taxpayer Compliance, MSMEs

LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperluas basis pajak, khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Reformasi tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta penerapan digitalisasi sistem perpajakan seperti e-Filing, e-Billing, dan Coretax. Kebijakan ini bertujuan untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mempermudah administrasi perpajakan bagi pelaku UMKM. UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih menjadi tantangan dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan digitalisasi teknologi perpajakan. Pengetahuan pajak merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan, tata cara pembayaran, serta pelaporan pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Eindra Rasendriya Daniswara dan Dian Anita Nuswantara (2025) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian lain oleh Michele Sudiarto dan Eko Budi Santoso (2024) juga menyatakan bahwa pemahaman perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selain pengetahuan pajak, sanksi pajak juga menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan hukuman administratif maupun pidana yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Penerapan sanksi pajak bertujuan memberikan efek jera agar wajib pajak lebih patuh terhadap peraturan perpajakan. Penelitian Nandrian Hanifan dan Ferdiansyah Ritonga (2025) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Slamet Mulyadin dan Lawe Anasta (2024) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Perkembangan teknologi digital juga mendorong pemerintah melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui layanan berbasis elektronik seperti e-Filing, e-Billing, dan Coretax. Digitalisasi teknologi perpajakan bertujuan mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Penelitian Rina Fitria et al. (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian Julian Muhammad Hasan dan Liana Dwi Septiningrum (2024) juga menyatakan bahwa penerapan e-Filing dan e-Billing mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan pada pelaku UMKM yang terdaftar di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja cabang Gunung Sindur. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa anggota koperasi merupakan pelaku usaha aktif yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi formal dan administrasi perpajakan. Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu yang masih menunjukkan perbedaan hasil penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan digitalisasi teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KSPPS Abdi Kerta Raharja cabang Gunung Sindur.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan kausal. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data yang diperoleh berupa angka dan dianalisis menggunakan statistik dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan digitalisasi teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Cabang Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert, kemudian dianalisis secara statistik untuk mengukur pengaruh antar variabel secara empiris. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar sebagai anggota koperasi sebanyak 1.166 anggota, dengan jumlah

sampel sebanyak 100 responden.

Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak tanpa kriteria tertentu sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel penelitian. Teknik ini digunakan agar sampel dapat mewakili populasi sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan dengan baik (Sugiyono, 2019).Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan digitalisasi teknologi, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Menurut Ghozali (2018), analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Pengujian data dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas, serta uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial, uji F untuk mengetahui pengaruh simultan, serta koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1549,398	3	516,466	1331,232	,000[b]
	Residual	37,244	96	,388		
	Total	1586,643	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,308	,328		3,986	,000
	Pengetahuan Pajak	1,017	,032	1,060	32,031	,000
	Sanksi Pajak	,007	,031	,007	,217	,829
	Digitalisasi Teknologi	-,116	,041	-,093	-2,817	,006

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak UMKM

Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,988[a]	,977	,976	,62287

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan digitalisasi teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja. Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai F hitung 224,118 > F tabel 2,70. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh kombinasi pemahaman perpajakan, penerapan sanksi, dan dukungan teknologi digital.

Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi dan koefisien determinasi (R^2), diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,988 yang menunjukkan hubungan sangat kuat antara pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan digitalisasi teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,977 atau 97,7% menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan digitalisasi teknologi mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 97,7%, sedangkan sisanya sebesar 2,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Secara parsial, pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai aturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak UMKM. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sal Sabila dan Khoiru Furqon (2020) serta Puspodewanti dan Susanti (2021). Penelitian ini juga mendukung Theory of Planned Behavior (TPB) yang menjelaskan bahwa pengetahuan meningkatkan keyakinan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sementara itu, sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM belum sepenuhnya menjadikan sanksi sebagai faktor utama dalam mendorong kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Farida dan Irawati (2023) serta Marcel Kusuma et al. (2023). Berdasarkan Deterrence Theory, sanksi akan efektif apabila diterapkan secara tegas dan konsisten. Namun dalam penelitian ini, sanksi perpajakan belum memberikan efek jera yang optimal terhadap pelaku UMKM.

Digitalisasi teknologi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sistem digital perpajakan seperti e-Filing, e-Billing, dan e-SPT memberikan kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas dalam proses pembayaran serta pelaporan pajak. Hasil ini mendukung penelitian Julian Muhammad Hasan (2024) yang menyatakan bahwa efektivitas digitalisasi perpajakan bergantung pada kemampuan dan pemahaman wajib pajak dalam menggunakan sistem digital. Temuan ini juga sesuai dengan Theory of Planned Behavior (TPB), di mana kemudahan sistem digital meningkatkan perceived behavioral control atau persepsi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM tidak hanya bergantung pada penegakan sanksi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan perpajakan dan kemudahan penggunaan teknologi digital. Oleh karena itu, peningkatan edukasi perpajakan, penerapan sanksi yang konsisten, serta optimalisasi layanan

perpajakan digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan digitalisasi teknologi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Cabang Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Secara parsial, pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan prosedur perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak UMKM. Sementara itu, sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang menunjukkan bahwa sanksi belum menjadi faktor utama dalam mendorong kepatuhan pajak. Digitalisasi teknologi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kemudahan penggunaan sistem perpajakan digital seperti e-Filing dan e-Billing membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara lebih mudah, cepat, dan efisien.

SARAN

Peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dilakukan melalui peningkatan edukasi dan pemahaman perpajakan bagi pelaku UMKM. Pemerintah dan otoritas pajak juga perlu meningkatkan sosialisasi serta pendampingan penggunaan sistem perpajakan digital agar wajib pajak lebih mudah beradaptasi dengan layanan digital perpajakan. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti kualitas pelayanan pajak, kesiapan digital, dan sosialisasi perpajakan, serta meneliti pengaruh implementasi sistem Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). *The Theory Of Planned Behavior*. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.

Becker, G. S. (1968). *Crime And Punishment: An Economic Approach*. *Journal Of Political Economy*, 76(2), 169–217.

Daniswara, E. R., & Nuswantara, D. N. (2025). Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Layanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JIRK: Journal Of Innovation Research And Knowledge*, 4(8), 5527–5536.

Farida, A., & Irawati, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Dimediasi Kualitas Pelayanan. *Jurnal Revenue*, 3(2), 488–505.

Fitria, R., Fionasari, D., & Sari, D. P. P. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 3(2), 139–150.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hasan, J. M., & Septiningrum, L. D. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management And Business*, 7(4), 1239–1254.

Hanifan, N., & Ritonga, F. (2025). Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 8(2), 90–101.

Kusuma, M., Et Al. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 4(1), 45–57.

Mulyadin, S., & Anasta, L. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Goodwood Akuntansi Dan Auditing Reviu*, 2(1), 89–107.

Puspodewanti, C. P., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Surabaya. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(11), 967–978.

Sabila, N. S., & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 263–276.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sudiarto, M., Santoso, E. B., & Universitas Ciputra Surabaya. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Perkembangan Teknologi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Di Kota Semarang. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 2.

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2022 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.